

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- . (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Budhiati, Ida. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu : Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C, Anwar. (2015). *Teori dan Hukum Konstitusi : Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya pada Lembaga Negara*. Malang: Setara Press.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- F, Indriana. (2019). *Pemilu di Indonesia*. Tangerang: Loka Aksara.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Citra Media.

- Fuady, Munir. (2013). *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana.
- Haboddin, Muhtar. (2016). *Dinamika Pemilihan Kepala Daerah dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Harman, Benny K. (2013). *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi : Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UU*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan I : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius.
- Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman. (2016). *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi Terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*. Bogor: Halaman Moeka Publishing.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nugraha, Nanang. (2017). *Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Palguna. (2018). *Mahkamah Konstitusi : Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konpress.

Prasetyo, Teguh. (2019). *Pemilu dan Etika Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*.

Bandung: Nusa Media.

—. (2019). *Penelitian Hukum (Suatu Persepektif Teori Keadilan Bermartabat)*.

Bandung: Nusa Media.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Pusat Bahasa.

Redi, Ahmad. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Sadi, Muhammad. (2021). *Hukum Pemerintahan : Dalam Perspektif Hukum Positif*

dan Hukum Islam. Jakarta: Kencana.

Siahaan, Maruar. (2005). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

Jakarta: Konstitusi Press.

Sudrajat, Tedi. (2017). *Hukum Birokrasi : Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Suparyanto, Yudi. (2018). *Demokrasi di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.

Teguh, Harrys Pratama. (2019). *Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia :*

Sebuah Kajian Teori dan Praktek Hukum Acara Konstitusi. Yogyakarta:

Pustaka Referensi.

Thalib, Abdul Rasyid. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya*

dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: PT Citra

Aditya Bakti.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Widodo, Heru. (2015). *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Alawiyah, T. (2022). IMPELEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI MELALUI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIH PEMULA DI KABUPATEN SERANG. *Pelita Bumi Pertiwi*, 4(4), 17-22.

Ali, M. M. (2016). Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 172-195.

Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang demokratis, damai dan bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 301-311.

Amarini, I. (2018). Evaluasi aktualisasi Pancasila melalui harmonisasi hukum. *Kosmik Hukum*, 17(2).

Antari, K. W., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

- Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 88-99.
- Askarial, S. H. (2018). Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *Menara Ilmu*, 12(2).
- Asy'Ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675-708.
- Aziz, N. L. L. (2016). Politik Anggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 51-64.
- Azmi, A. (2019). Analisis Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 74-90.
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Warta Dharmawangsa*, 13(3).
- Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. *Gema Keadilan*, 6(2), 196-216.
- Budiyono, B. (2013). Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).

- Budoyo, S. (2014). Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *CIVIS*, 4(2).
- Busthami, D. (2017). kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336-342.
- Cerdas, F. A., Abdurahman, A., & Perwira, I. (2022). Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 4(1), 40-53.
- Darmawan, D., & Falah, M. F. (2022). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 241-250.
- Dewansyah, B. (2015). Model Kampanye Deliberatif dalam Desain Pemilihan Kepala Daerah Serentak: Sebuah Gagasan Perubahan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 21-41.
- Desmon, A. (2018). Penafsiran Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 129-137.
- Dwinanda, R. A., Saraswati, R., & ALW, L. T. (2017). Analisis Keragaman Model Pengisian jabatan Kepala Daerah di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-23.
- Fadli, A. M. D., Tobarasi, I., & Rusba, K. (2018). Kemenangan petahana dalam kontestasi Pilkada serentak 2018: Ditinjau dari perspektif powercube. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 14(2), 115-139.

- Fritz Edward Siregar. (2021). Modifikasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu*. Bawaslu DKI Jakarta Edisi Desember 2021.
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Hamdi, M. F. (2019). Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 316.
- Hanadi, S. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 16(1), 349-360.
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *Adalah*, 4(1), 121-128.
- Hastuti, E., Wantu, F., & Tijow, L. M. (2020). Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 137-152.
- Hergianasari, P. (2020). Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 112-121.

- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 167-181.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 48-56.
- Kurniawan, B., & Purbosari, N. R. (2022). PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI JALUR MEDIASI. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(1), 83-96.
- Kurniawan, I. G. H., & Arianto, H. (2020). Polemik Pembatasan Masa Jabatan untuk Jabatan Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Pancasila. *Lex Jurnalica*, 17, 264-270.
- Lailam, T. (2014). Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 19.
- Lubbi, M. M. (2021). ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM NOKEN DI PROVINSI PAPUA DALAM PRINSIP DEMOKRASI DAN SISTEM HUKUM NASIONAL. *Dharmasisya*, 1(2), 25.

- Maulana, G. I. J., Fridawati, P. I., & Masruroh, H. (2022). Pemilu 2024: Pesta demokrasi akbar pembangkit kondisi ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(8), 751-757.
- Monteiro, J. M. (2018). Teori penemuan hukum dalam pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 267-286.
- Mawar, S. (2020). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 22-38.
- Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 77-94.
- Prawitasari, I., & Erowati, D. (2021). Efektivitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1176-1183.
- Rakia, A. S. R. S., Simanjuntak, K. W., Hidayat, W. A., & Darmawansya, A. (2021). Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Amsir Law Journal*, 3(1), 30-38.
- Ramadani, R., & Mamonto, M. A. W. W. (2019). Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Petitum*, 7(2 Oktober), 63-71.
- Rumokoy, N. K. (2016). Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(6).

- Safaat, M. A., Widiarto, A. E., & Suroso, F. L. (2017). Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 234-261.
- Safudin, E. (2021). HARMONISASI HUKUM DALAM ANTINOMI HUKUM (ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 20 AYAT 2 HURUF B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(2), 201-229.
- Sarbaini, S. (2014). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Sarjan, S., Mulya, K. A. K., & Chadijah, S. (2020). Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 59-76.
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17-25.
- Sinaga, R. S. (2013). Implikasi Distorsi Demokrasi Pada PemiluKada terhadap Penguatan Demokrasi Lokal. *PERSPEKTIF*, 2(1).
- Sugiarto, A. H. (2019). Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi.
- Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 206.

- Sumadi, A. F. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 849-880.
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55-66.
- Suryanto, J. A., Amanda, H. K., Sakinah, H. N., & Maherdikka, R. (2021). RANGKAP JABATAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PEJABAT NEGARA LAINNYA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(1), 165-165.
- Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 025-050.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 3(1), 32-48.
- Tuanaya, H. H. (2021). KEDUDUKAN HUKUM PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGANTI KEPALA DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 67/PUU-XIX/2021 20 APRIL 2021.
- Utami, D. K. S. (2021). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Tengah Pandemi COVID-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 1(1), 13-26.

- Wibowo, M. (2015). Menakar konstusionalitas sebuah kebijakan hukum terbuka dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 196-216.
- Wicaksono, D. A., & Ayutama, O. A. (2015). Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia 1. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 157-179.
- Widiarto, A. E., Safa'at, M. A., & Wibowo, M. (2018). PEMAKNAAN NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Arena Hukum*, 11(2), 369-387.
- Yasin, J. (2009). *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. Bandung Islamic University.
- Zubaidy, A. (2021). Menggagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898)

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)

UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721)

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XX/2022

D. Website

Kemendagri Mutakhirkan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan

Pulau di Seluruh Indonesia. (2022), diakses dari

<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-mutakhirkan--kode-data-wilayah-administrasi-pemerintahan--dan-pulau-di-seluruh-indonesia> (diakses 10 November 2022, pukul 22.52 WIB)

Fahadil Amin Al Hasan. (2018), diakses dari

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menjadikan-tujuan-syariah-maqashid-syariah-sebagai-basis-utama-penemuan-hukum-oleh-syaiful-amin-s-h-i-m-h> (diakses pada 9 Januari 2023, pukul 21.30 WIB)

Sri Pujiarti. (2020). Pemerintah Tegaskan Masa Jabatan Kepala Daerah Hanya Dua

Periode, diakses dari

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16636&menu=2>
(diakses pada 4 Februari 2023, pukul 15.14 WIB)

Kominfo. 270 Daerah Akan Gelar Pilkada Serentak Pada 2020. (2019), diakses dari

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/19260/270-daerah-akan-gelar-pilkada-serentak-pada-2020/0/berita#:~:text=Dari%20270%20daerah%20yang%20akan,%3B%20dan%209.%20Sulawesi%20Tengah.> (diakses pada tanggal 4 Februari 2023, pukul 16.05 WIB)